

BAB III

PERBANDINGAN KEBIJAKAN

A. Arah Kebijakan Boris Yeltsin

Terpilihnya Boris Nikolayevich Yeltsin atau yang biasa dipanggil Yeltsin sebagai presiden Rusia secara langsung di *Russian Soviet Federated Socialist Republic* (RSFSR) pada tanggal 12 Juli 1991 menjadi salah satu penanda atau sekat antara runtuhnya komunisme Uni Soviet dan awal berdirinya Negara Federasi Rusia, karena pada akhirnya tanggal 25 Desember 1991, Uni Soviet secara resmi telah dibubarkan³⁹.

Pasca Uni Soviet, Rusia terlepas dari kekuasaan totaliterisme komunisme Imperium Soviet dan memulai masa transisi di bawah pemerintahan Boris Yeltsin. Boris Yeltsin lahir dari kalangan keluarga petani di kawasan pegunungan Ural tahun 1931, Boris Nikolayevich Yeltsin menanjak dalam hierarki Partai Komunis. Dia pernah menjabat sekretaris partai di Sverdlovsk, kota rahasia yang menjadi sentra industri pertahanan.

Setelah akhirnya diserang dari berbagai sudut termasuk oleh Gorbachev, Yeltsin meninggalkan Politburo pada tahun 1988 dan dalam dua tahun hengkang dari Partai Komunis. Meski tidak lagi dalam partai, Yeltsin tetap populer. Pada tahun 1991, dia muncul sebagai presiden terpilih pertama Rusia, jabatan tituler yang bergantung pada keberadaan Uni Soviet. Pada bulan Agustus tahun yang sama, kubu konservatif garis keras berusaha melancarkan kudeta. Yeltsin menggalang barisan liberal dan kembali membawa Gorbachev ke kursi kekuasaan. Namun, Yeltsin juga menggunakan kudeta itu untuk mendiskreditkan Gorbachev dan para perencana kudeta.

³⁹ Sunaryono, B. (2012). *Rusia Pascakomunisme: Jalan Panjang Menuju Perubahan*. Yogyakarta: Prudent Media bekerjasama dengan Jurusan Hubungan Internasional UMY.

Dia melarang Partai Komunis, yang masih merupakan fondasi kekuasaan Soviet. Menjelang akhir tahun, Uni Soviet ambruk⁴⁰.

Boris Yeltsin kemudian menjadi presiden pertama Rusia yang independen. Dengan ambruknya tata lama muncul liberalisasi ekonomi. Namun, ini berarti munculnya pasar saham, lonjakan inflasi, kekayaan bertumpuk bagi segelintir orang, penderitaan menumpuk di pundak banyak warga, dan mengguncang psikologis dahsyat bagi negara yang terbiasa dengan arahan negara ini. Di dunia internasional, Yeltsin menghendaki Rusia dihormati sebagai kekuatan dunia, tapi dia juga memerlukan investasi Barat. Dia memutuskan Amerika Serikat merupakan harapan terbaik untuk menstabilkan negaranya dan memberikan dukungan gigih. Perlahan-lahan perekonomian membaik. Pasar baru mulai dibuka dengan berbagai produk populer dan harga yang terjangkau.

Untuk menjalankan reformasi ekonomi, Yeltsin menganggap bahwa perlu adanya perubahan pada konstitusi untuk dapat menjalankan pemerinthannya, pasalnya sistem pemerintahan yang ada saat itu masih menggunakan sistem tradisional Uni Soviet yang menganut sistem pasar yang terencana dan terpusat yang dipegang sepenuhnya oleh pemerintah. Ternyata sistem tersebut dirasa sangat membatasi ruang gerak Boris Yeltsin sebagai Presiden untuk melakukan reformasi ekonominya yang memang membutuhkan banyak dukungan rakyat.

Pada saat era Yeltsin dimulai, ia ingin mencapai sistem pasar bebas secara singkat, Yeltsin menggunakan agenda terapi kejut atau yang dapat disebut *Shock Therapy*⁴¹ yang dimana agenda ini sangat mem-Barat-kan ekonomi Rusia dan

⁴⁰ Aleksandrovi, G. (1948). *The Pattern of Soviet Democracy*, New York: St. Martin's Press.1948, hlm. 26. New York: St. Martin's Press.

⁴¹ Sunaryono, B. (2012). *Op.cit*, hlm 136

hal tersebut diadopsi dari negara – negara kapitalis modern yang berada dalam wadah internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia (*World Bank*), dan ekonom Amerika Serikat yang cenderung terlibat aktif dalam reformasi ekonomi besar – besaran Rusia⁴². *Shock Therapy* tersebut merupakan proses swastanisasi perusahaan – perusahaan yang selama ini dikuasai oleh pemerintah dan direbutkan oleh pengusaha – pengusaha kalangan masyarakat yang memunculkan kelompok –kelompok OKB (Orang Kaya Baru)⁴³. Mereka membuat sebuah *inner circle* dan menamai diri mereka sebagai kaum origarki yang mendukung, sekaligus memanfaatkan kekuasaan rezim Boris Yeltsin. Berkat kerja keras Yeltsin dalam merombak konstitusi Rusia, reformasi ekonomi Rusia akhirnya berubah menjadi ekonomi berbasis pasar bebas dimana sistem pasar dikembalikan oleh masyarakat dan masyarakat bebas mengatur pasar tersebut.

Kondisi perekonomian warisan Uni Soviet telah membawa masyarakat Rusia dalam kesengsaraan. Hal ini terungkap dalam depresi ekonomi pada periode tahun 1989-1991, krisis anggaran belanja negara dan ketidakseimbangan moneter, inflasi dan disintegrasi perdagangan eceran, krisis hubungan ekonomi luar negeri, dan ekonomi yang tidak terkendali. Melihat keadaan tersebut, Rusia merasa perlu untuk memperbaiki kondisi itu⁴⁴. Sehingga sebagai presiden pertama Rusia, Boris Yeltsin menegaskan bahwa ia akan mengawali usaha pemecahan masalah itu dengan prioritas utama masalah ekonomi baik infra struktur maupun supra struktur. Reformasi

⁴² Loc.cit, hlm 137

⁴³ Fahrurodji, A. (2005). *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm 202

⁴⁴ Shleifer, A., & Treisman, D. (2001). *Without a Map, Political Tactics and Economic Reform in Russia*. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press. Hlm 54

Rusia ini juga ditujukan untuk mengalihkan sistem ekonomi berencana peninggalan Uni Soviet ke sistem ekonomi pasar.

Tahun 1990-an merupakan dekade pergolakan yang sangat ekstrim terhadap perkembangan makro ekonomi Rusia. Antara Desember 1991 dan Desember 2001, nilai mata uang Rubel jatuh lebih dari 99 persen terhadap US dollar. Pada tahun 1992 GNP Rusia serta produksi industri jatuh 20 persen bahkan barang-barang retail harganya naik sampai 90 persen. GDP Rusia mengalami defisit mencapai 30 persen.

Dalam kebijakan ekonominya, Yeltsin ingin sekali meninggalkan reformasi campur aduk era Gorbachev. Yeltsin juga menganjurkan privatisasi, tapi di atas itu semua ia menekankan kebutuhan bagi percepatan harga pasar. Selain rencana itu, Yeltsin juga menempuh langkah lain dalam *shock therapy* yang dimaksudkan untuk lebih mengefesienkan dan merasionalkan penggunaan sumber-sumber ekonomi Negara dengan memperbolehkan harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Hal ini dengan segera membutuhkan penghapusan semua subsidi dan kontrol harga⁴⁵.

Dalam upaya menindak lanjuti langkah tersebut, pada bulan Januari 1992 reformasi ekonomi Rusia mulai dijalankan dengan harapan transformasi ke ekonomi pasar bisa berlangsung lebih cepat. Reformasi ini berintikan tiga komponen utama yaitu, stabilisasi makro, liberalisasi ekonomi dan swastanisasi. Stabilisasi adalah kebijakan uang ketat yang ditujukan untuk menekan inflasi dan impor. Liberalisasi berkenaan dengan pembebasan harga-harga termasuk pembebasan pasar buruh, dan pembebasan pergerakan barang-barang jasa, modal dan teknologi melewati batas negara. Sedangkan swastanisasi menyangkut upaya pengembangan

⁴⁵ Goldman. Op.cit. hlm 50

sektor swasta dan mendorong kemandirian perusahaan-perusahaan negara.

Pembebasan harga-harga merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi kontrol dan subsidi harga pemerintah. Pengurangan ini sangat penting sebagai langkah awal penciptaan pasar domestik dan eksternal. Bersamaan dengan itu, ekonomi Rusia dibuka selebar-lebarnya terhadap arus produksi dari luar negeri. Pembukaan ekonomi terhadap perdagangan luar negeri dimaksudkan untuk memungkinkan pasar internasional mempengaruhi struktur harga dalam pasar dalam negeri⁴⁶.

Pada masa pemerintahan Boris Yeltsin kondisi perekonomian Rusia tidak kunjung mengalami perubahan yang signifikan, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

1. Superpresidensialisme Rusia

Dalam konstitusi yang dibuat oleh tim Yeltsin setelah mereformasi konstitusi pada tahun 1993 dengan perombakan yang keras yaitu dengan membubarkan parlemen dengan paksa. Konflik antara parlemen dengan Yeltsin diakibatkan oleh perbedaan pandangan antara dua kubu yaitu kubu Yeltsin yang menginginkan sistem presidensial sedangkan kubu komunis yang kebetulan menguasai parlemen menginginkan sistem parlementer. Konflik tersebut berakibat dilakukannya intervensi militer oleh Yeltsin terhadap parlemen dan sekaligus membubarkannya.

⁴⁶ Islam, S. (1993). "Russia's Rough To Capitalism". Foreign Affairs No.02, Spring, 1993, 13. Martin, L. S. (1995). "The Encyclopedia of Democracy". Washington: Congressional Quarterly Inc. hlm 13

Pada awalnya Yeltsin melawan dengan tegas terhadap kediktatoran komunisme akan tetapi, kediktatoran kemudian berlanjut dalam pemerintahannya. Setiap perintah dan keputusan Yeltsin merupakan standar dalam pemerintahannya. Yeltsin tidak pernah mau berkompromi atau menyelesaikan masalahnya secara kooperatif. Rezim Yeltsin dibangun berdasarkan gabungan dari demokrasi, authoritarian dan elemen demokrasi. Kondisi ini digambarkan sebagai suatu kerajaan konstitusional yang elektoral tetapi dalam dataran presidensiil. Perlawanan yang dilakukan oleh Yeltsin terhadap parlemen tahun 1991 sampai 1993 yang diakhiri dengan pembubaran parlemen dan mengamandemen undang-undang dengan kehendaknya sendiri merupakan langkah awal Yeltsin yang mencerminkan pendefinisian superpresidensialisme terhadap rezim Yeltsin.

Secara personal Yeltsin merupakan sosok yang authoritarianisme, meskipun dalam beberapa hal lebih demokratis. Yeltsin juga selalu membubarkan pemerintahan lokal apabila pemerintahan lokal melawan keputusan yang dikeluarkan oleh Yeltsin. Bahkan ketika Mahkamah Konstitusi memberi teguran terhadap keputusan Yeltsin, Yeltsin tidak pernah menghiraukannya dan memecat kepala Mahkamah Konstitusi tersebut. Kekuasaan Yeltsin yang berlebihan ini dikarenakan dari sejak awal Yeltsin mempunyai peran dalam penyusunan undang-undang yang baru tahun 1993. Yeltsin memperlemah kekuasaan lembaga legislatif dan kekuasaan peradilan tinggi⁴⁷.

⁴⁷ Cohen, A. (2000). From Yeltsin to Putin, Milestone on an unfinished journey. Policy Review, hlm 38.

2. Korupsi

Superpresidensialisme mengindikasikan bahwa tidak adanya kontrol yang ketat terhadap pengeluaran negara dikarenakan terlalu kuatnya kekuatan presiden sehingga tidak ada *check and balance* terhadap pengeluaran tersebut. Superpresidensialisme Rusia mengindikasikan bahwa Rusia mendapatkan salah satu konsekuensi dari suatu presidensialisme yaitu merajalelanya korupsi. Kehidupan Yeltsin dikelilingi dengan lingkungan yang sangat korup. Menanggapi hal tersebut Yeltsin hanya berbicara normatif terhadap korupsi disekitarnya tanpa adanya tindakan yang tegas.

Akibat dari korupsi yang merajalela pemerintah hanya mendapatkan 40 persen dari penerimaan pajak dari yang sesungguhnya. Sikap Yeltsin yang sekiranya tidak responsif terhadap korupsi tersebut merupakan hal yang tidak mengherankan karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan korupsi terbesar berada di Kremlin, keadaan kemudian semakin buruk karena oligarkhi ekonomi yang melemahkan perekonomian Rusia terdapat hubungan yang erat dengan dukungan mereka di Kremlin.

Korupsi, kolusi dan peningkatan kriminalitas merupakan suatu paket dari perkembangan masyarakat yang belum matang, begitupun kendala yang dihadapi Rusia yang baru memasuki masa demokrasi yang diawali dengan langkah yang agak kontroversial dalam demokratisasi yaitu dengan mengalami super presidensialisme dibawah pemerintahan Yeltsin. Peningkatan kriminalitas tersirat dari turunnya grafik standar perekonomian, penurunan kualitas kehidupan yang diakibatkan tidak seimbangnya pemerataan perekonomian di Rusia menjadi pemicu utama naiknya peningkatan kriminalitas. Kehidupan *the ruling class* suatu negara mencerminkan tingkat keadaan rakyat yang memilihnya,

itulah kiranya kata yang tepat dalam menjelaskan keadaan masyarakat bawah di Rusia dibawah pemerintahan Yeltsin.

3. Penguasaan Kaum Oligarki Terhadap Sumber Kekayaan Ekonomi Negara

Semenjak Yeltsin berkuasa, kaum pengusaha di Rusia seolah mendapatkan angin segar dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini berkat sistem perekonomian pasar yang dicanangkan Yeltsin yang membuat persaingan usaha lebih terbuka. Padahal Rusia saat itu masih dalam keadaan kemerosotan ekonomi yang tajam pasca tumbanganya rejim komunis. Di tambah lagi dengan dibukanya kerjasama ekonomi yang intensif dengan dunia Barat yang semakin membuat para pengusaha lokal terangsang untuk melebarkan sayap perusahaannya serta mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Kemudian untuk mendukung tercapainya sistem ekonomi pasar itu, digalakkanlah program swastanisasi perusahaan-perusahaan milik negara. Fakta tersebut pada akhirnya memunculkan kalangan pengusaha yang kaya mendadak dan disebut dengan kaum oligarki⁴⁸.

Kemunculan kaum oligarki tersebut telah membuat banyak polemik di tubuh pemerintahan dan masyarakat awam, khususnya kelas bawah. Perusahaan-perusahaan negara yang memenuhi kebutuhan hidup rakyat Rusia banyak dikuasai kaum oligarki demi mencapai kepentingan pribadi, kolega dan keluarganya. Hasil kekayaan kaum oligarki tersebut banyak yang disimpan di

⁴⁸ Mas'oeed, M. (1994). Negara, Kapital dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rais, A. (n.d.). "Kembaliya Kelompok Komunis di Eropa Timur". Laporan Penelitian Universitas Gadjah Mada. Hlm 12

bank-bank luar negeri. Akibatnya, banyak penduduk jatuh miskin, pengangguran terjadi di mana-mana, angka inflasi pun semakin naik dari hari ke hari, hutang Negara semakin menumpuk, kas negara kosong sehingga tak sanggup membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur masyarakat ataupun menggaji pegawai dan karyawan.

Puncaknya adalah lahirnya krisis ekonomi 1993 yang menggoyahkan sendi-sendi ekonomi negara dan menjatuhkan reputasi Yeltsin serta mengurangi dukungan terhadapnya di parlemen. Tak heran jika para oligarki banyak disalahkan dan dikecam oleh masyarakat karena sepak terjangnya yang semakin merugikan negara dan menyengsarakan rakyat Rusia. Bukan hanya itu saja, banyak dari kaum oligarki pun terjun ke dalam kancah politik dan mengintervensi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Sehingga membuat stabilitas ekonomi nasional semakin terganggu dan tidak menentu.

Sering pula terjadi konflik kepentingan di antara mereka akibat dari ulah mereka yang berlebihan dalam mencampuri urusan negara demi tercapainya tujuan masing-masing. Secara perlahan namun pasti, kaum oligarki telah merampok negara dan menguras habis kekayaan negara yang diperuntukkan masyarakat.

Suatu keadaan yang sangat ironis sekali, Rusia dengan berbagai kekayaan alam yang dimilikinya dan predikatnya sebagai pemilik cadangan gas alam terbesar di dunia, pemilik cadangan batubara terbesar kedua di dunia serta pemilik cadangan minyak terbesar kedelapan di dunia, namun malah terpuruk dalam kebangkrutan ekonomi yang sangat krusial dan mengenaskan. Mungkin inilah yang dikehendaki dunia Barat (AS) dalam rangka melemahkan posisi dan pengaruh Rusia dalam forum internasional.

Kremlin yang merupakan simbol kekuasaan Rusia disinyalir menjadi pusat dari semua tindakan dan praktek-praktek kotor para oligarki di masa Yeltsin. Kremlin seakan-akan menjadi sarang bagi berkembangnya sistem kekeluargaan dan favoritisme ala Yeltsin yang suka menempatkan orang-orang terdekatnya pada posisi-posisi strategis di pemerintahan.

Harian Washington Post, Minggu 30 Agustus 1998, menuliskan: “Kehancuran ekonomi telah merusak keyakinan soal pasar bebas dan demokrasi yang didambakan. Mata uang rubel meledak, kekuasaan digenggam para tycoon dengan dukungan kaum oligarki dan menjamurnya pasar gelap. Konsep reformasi pasar dan demokrasi yang sudah berlangsung 6,5 tahun pun berada dalam ancaman. Pada masa puncak krisis, Presiden Yeltsin juga sudah mulai sakit-sakitan. Bukan itu saja, ia lebih dipandang sebagai simbol stagnasi dan frustrasi ketimbang kemajuan. Muncul pula opini-opini yang mempertanyakan arah reformasi. Pada tahun 1998, Yeltsin praktis telah kehilangan kontrol atas proses politik di Rusia⁴⁹ .

Bantuan dana IMF pada 1998 juga gagal memulihkan keadaan, bahkan bantuan itu berhamburan keluar dari Rusia⁵⁰. Jangankan investor asing, para oligarki pun tidak akan mau segera merepatriasi modalnya ke dalam negeri. Dengan keadaan ini tidak heran jika disebutkan bahwa krisis ekonomi Rusia disebut sebagai sistemik. Akhirnya pada Desember 1998, Rusia menyatakan tak sanggup lagi membayar utang yang jatuh tempo sekitar 360 juta dolar ke London Club. Hal serupa terulang pada 21 April 1999, dimana Rusia gagal

⁴⁹ Shleifer & Treisman, 2001, Op.cit, hlm 39

⁵⁰ Cohen, A. (1999). What Rusia Must Do to Recover from its Economic Crisis. USA: Heritage Foundation. Hlm 65

membayar utang 1,3 milyar dolar AS dari warisan Uni Soviet. PM Yevgeny Primakov (menjabat September 1998-Mei 1999) tak mampu memperbaiki krisis yang memuncak pada masa jabatannya. Ekonomi Rusia sudah berada dalam keadaan putus asa. Pemulihannya sangat sulit dan memerlukan tindakan pahit.

Dalam keadaan yang bisa menggoyahkan stabilitas ekonomi Negara tersebut, Rusia membutuhkan pemimpin ekonomi baru yang memiliki banyak pengalaman dan mampu merencanakan transisi ekonomi dengan solid. Yeltsin pun mencoba mengganti para pejabat yang tidak berkompeten dalam bidangnya demi menanggulangi krisis ekonomi yang semakin parah. Nikolai Aksenenko, seorang mantan eksekutif Jawatan Kereta Api Rusia dan juga kerabat dekat keluarga Yeltsin, kemudian didaulat menjadi Deputy Pertama PM untuk mendampingi Sergei Stepashin yang sedang menjabat sebagai PM menggantikan Primakov. Namun pengangkatan itu tidaklah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Rusia, malah semakin membuat citra Kremlin sebagai simbol kekuatan Rusia semakin pudar karena dipenuhi oleh para pejabat terdekat Yeltsin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan sebagian kelompok saja.

Untuk mengatasi kekacauan ekonomi Rusia, Yeltsin memerlukan tim yang kuat dan solid dengan pengalaman tentang ekonomi pasar yang memadai dan memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan kebijakan pro-pasar. Namun hal itu tidak terpenuhi kala Yeltsin menjabat, sebab pemilihan pejabat didasarkan pada sistem kekeluargaan dan hubungan dekat. Tidak mengherankan jika krisis ekonomi tak kunjung reda, bahkan menemui jalan buntu dalam pemecahannya. Kremlin telah diisi dengan para pejabat negara yang mendapat dukungan penuh dari kaum oligarki, sehingga mereka dengan senang hati memuluskan segala permintaan dan masukan

kelompok pebisnis tersebut. Akibatnya kepentingan kelompok tertentu lebih diprioritaskan dan diperhatikan daripada kepentingan publik.

Ketika PM Primakov berkuasa, telah terjadi penurunan tingkat pajak untuk industri tertentu berkat usulan oligarki. Sistem favoritisme justru berlangsung marak pada saat transisi menuju ekonomi pasar sedang terjadi. Banyak juga dari program dan agenda pemerintahan yang dibiayai oleh kaum oligarki. Tidak hanya itu, sebagian oligarki telah menempati pos-pos strategis di Kremlin. Korupsi pun tak dapat dihindarkan. Lebih parah lagi, Bank Sentral Rusia juga menjadi bagian dari praktek korupsi dan manipulasi. Di satu sisi, angka kriminalitas juga meningkat tajam disebabkan pengangguran dan kemiskinan yang merajalela serta sebagai bentuk dari protes keras masyarakat luas atas kebobrokan kinerja Yeltsin dan kroni-kroninya.

Situasi di atas membuat penerimaan negara terus mengalami penurunan yang drastis. Banyak dari aset-aset dan penghasilan utama negara telah jatuh ke dalam genggamannya kaum oligarki, sehingga hanya masuk kantong mereka saja, dan tak ada sedikit pun yang menetes kepada rakyat Rusia. Krisis ekonomi pun mencapai puncaknya, sedangkan para investor asing mulai takut dan berhamburan keluar mencabut investasinya setelah mengalami kenyataan yang memprihatinkan tersebut. Kehancuran ekonomi juga terjadi akibat ulah para pejabat yang pandai memutarbalikkan fungsi-fungsi lembaga negara. Banyaknya kaum oligarki yang bercokol di tubuh pemerintahan telah membuat sistem politik Rusia menjadi rancu.

B. Arah Kebijakan Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovich Putin lahir di Leningrad, yang sekarang diganti nama menjadi Saint Petersburg. Putin menjabat sebagai presiden kedua Negara Federasi Rusia secara resmi setelah memenangi pemilihan umum pada 26 Maret 2000. Vladimir Putin adalah sosok sentral kebangkitan Rusia setelah pasca Uni Soviet. Dia berkuasa sejak tahun 2000, berlatarbelakang sebagai mantan Anggota KGB (Committee for State Security of the Soviet Union) yang terkenal cerdas.. Vladimir Putin menghabiskan 8 tahun sebagai perwira intelijen asing di KGB. Keterlibatannya sebagai mata-mata di Jerman Timur memberi kedekatan historis dengan Jerman. Putin terkenal dengan kemampuan intelijennya yang luar biasa, namun pada saat masih bertugas di Jerman Timur dia menyaksikan keruntuhan negara tersebut. Pada saat yang sama kantor cabang KGB di sana juga disegel oleh para demonstran⁵¹.

Berakhirnya era Jerman Timur, seakan menjadi penanda keruntuhan Uni Soviet yang tinggal hanya menunggu waktu. Rentetan keruntuhan komunisme di Eropa pada akhirnya merambah ke negara asalnya yaitu Uni Soviet. Setelah Jerman bersatu Putin kembali ke Rusia, kemudian menanggalkan posisinya di KGB.

Setelah pekerjaannya di KGB berakhir yang ditandai runtuhnya Uni Soviet tahun 1990, Ia menjabat sebagai anggota staf pemerintah saja pada awalnya. Kemudian ia menjadi Kepala Dinas Keamanan Federal (FSB) pada Juli 1998, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Kontrol. Dari sini ia naik jabatan menjadi PM karena memperlihatkan kesan baik dan kooperatif bagi lingkaran dalam Yeltsin dan oligarki. Namun mereka tidak melihat kecurigaan dan rasa

⁵¹ Michael T. Klare, *Rising Powers, Shrinking Planet, Oneworld* Oxford, Glasgow. 2008. Hlm 92

sentimen yang berarti dalam diri Putin. Karena Putin sangat cerdas dan lihai dalam menyimpan rasa ketidaksukaannya terhadap “keluarga” Yeltsin serta misi dan visinya yang terselubung untuk membangkitkan kejayaan Rusia. Sebelumnya Putin menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan pada Maret 1999, dan resmi menjadi PM pada Agustus 1999. Saat itu lingkungan Kremlin sedang mencari-cari sosok PM dan juga calon pengganti Yeltsin. Dan akhirnya Putin menjabat sebagai pejabat presiden pada Desember 1999 sebelum resmi menjadi Presiden Negara Federasi Rusia.

Selepas mendapat gelar sarjana hukum, Putin tak sempat memilih profesi sebagai praktisi hukum, karena langsung masuk ke KGB, salah satu agen intelijen yang paling disegani di dunia sekelas FBI di AS. Pengalaman bekerja di KGB ini kemudian menjadi bekal bagi Putin untuk mencapai ke puncak kekuasaan Rusia. Dia adalah presiden kedua Rusia setelah Boris Yeltsin, yang secara resmi dimulai pada 7 Mei 2000. Jika dibandingkan dengan para penguasa Kremlin sebelumnya, usia Putin ketika mulai menjabat sebagai presiden masih tergolong muda, yakni 47 tahun. Menjadi presiden di usia muda merupakan prestasi tersendiri bagi Putin, mengingat jabatan kepresidenan Rusia sebelumnya selalu diduduki oleh para senior yang umurnya relatif tua.

Vladimir Putin dijuluki oleh Washington Post sebagai seorang nasionalis yang kukuh dan penuh komitmen. Ia tak pernah suka membaca cerita yang suka dibuat para pembelot Uni Soviet. Putin benci dengan pembelotan beruntun dan sering dilakukan oleh para agen KGB. Bagi Putin, KGB adalah aparaturnegara yang tetap penting, lepas dari sistem apapun yang dipakai negara. Walau ia sudah mundur sebagai kolonel KGB di era Gorbachev. Putin mengatakan bahwa masa lalu Rusia (Uni Soviet) adalah sebuah keadaan yang berbeda. Pernyataan Putin ini merupakan jawaban yang tak langsung atas sikap dan pandangan mayoritas warga Rusia di awal dekade 1990-an, yang trauma dengan keberadaan KGB.

Maklum, lembaga ini telah menyusup hingga ke dalam kehidupan pribadi rakyat Rusia.

Rusia sekarang sudah menjadi satu negara yang relatif berbeda, dimana sipil sudah mulai bersuara. Putin menambahkan, jika Rusia bisa menghargai elemen-elemen berharga dari masyarakat sipil yang sudah dicapai saat ini, maka keberadaan masyarakat sipil secara perlahan akan melahirkan kondisi, di mana badan keamanan yang menakutkan itu tidak akan pernah muncul kembali. Elemen-elemen yang dimaksud adalah demokrasi, penegakan aturan main, dan tingkah laku yang mementingkan kepentingan umum daripada pribadi ataupun kelompok tertentu.

Ketika Putin diangkat menjadi presiden, bidang ekonomi telah berubah menjadi ajang praktek kriminal. Misalnya, ia melihat pengalihan kekayaan negara ke swasta dengan cara-cara yang licik dan tidak etis. Ia sangat berambisi untuk mengembalikan peran negara yang kuat. Ia ingin meluruskan kembali jalan bengkok yang sudah sempat terjadi akibat ulah oligarki. Karena itu, kelompok ini adalah sasaran tindakan pertama Putin, walau ia mengatakan tak akan mengembalikan Rusia ke jalur totaliter seperti pada masa sebelumnya.

Di saat Putin mulai memegang kekuasaan, ia tetap merendah dan enggan tampil di publik. Ia jauh dari penampilan berwibawa. Putin juga memiliki ekspresi wajah ibarat orang bertopeng yang jarang tersenyum dan berbicara dengan nada lembut. Selama bertahun-tahun, ia memiliki reputasi sebagai *the invisible man*, seseorang yang berkuasa di balik layar. Setelah terpilih pada pemilu Maret 2000, ia kemudian mengonsolidasikan kekuasaan secara vertikal. Pada Mei 2000, sebagai presiden, Putin mengeluarkan dekret yang membuat 89 wilayah menjadi distrik, yang diawasi oleh orang kepercayaan Putin sendiri dengan tujuan untuk memperkuat posisi pemerintahan pusat pada waktu itu..

Putin dikenal dengan sosok dan jiwa nasionalismenya yang kuat mengakar di dadanya. Sebab itu, pada Juli 2000, Putin mengusulkan pada parlemen agar hak-hak pemerintah daerah dilucuti dengan tujuan untuk penguatan wewenang pada pemerintah pusat. Ini dilanjutkan pada tahun 2004, ketika ia merubah sistem pemilu pemerintahan daerah. Sebelumnya, Yeltsin memberi wewenang lebih luas pada pemerintah daerah melalui pembuatan undang-undang yang memungkinkan rakyat dapat memilih langsung presidennya. Pada Desember 2000, dengan semangat nasionalismenya yang menyala-nyala, ia pun sempat merubah lagu kebangsaan Rusia ke era Soviet dengan sedikit modifikasi kalimat pada lagu itu.

Demi mengangkat reputasinya di mata pejabat dan rakyat Rusia, Putin juga taktis dengan melindungi pendahulunya, Gorbachev dan Yeltsin. Pada 12 Februari 2001, Putin menandatangani hukum yang menjamin kekebalan hukum para mantan presiden dan keluarganya. Hal ini membuat Putin membungkam para presiden sebelumnya. Hampir tak ada kritikan buat Putin dari dua presiden di era sebelumnya. Di samping itu, Putin dijuluki sebagai orang misterius, sedikit bicara tetapi tegas. Namun, ia adalah orang yang juga berjalan dengan pola pikir tajam, cerdas, cermat dan penuh perhitungan.

Meski Putin berkarakter sebagai orang keras dan misterius, ia dipandang sebagai tokoh liberal dan reformis. Putin juga diidolakan oleh kalangan muda, warga Moskow dan kaum intelektual. Ia juga dikenal sebagai ketua organisasi yang bijaksana dan lihai dalam memberi doktrin yang menggerakkan massa. Secara perlahan-lahan, Putin makin memperlihatkan warna pribadinya. Pada Desember 2000, tulisannya di internet dipandang sebagai manifestasi keinginan dan misinya sebagai presiden. Putin meneruskan sistem perekonomian pasar yang dipilih pendahulunya, tapi dengan menyesuaikan pada kondisi ekonomi Rusia.

Putin menegaskan bahwa Rusia masih merupakan negara yang didasarkan pada sistem paternalistik yang kuat. Yaitu sistem yang merujuk pada peran negara yang lebih menonjol daripada elemen sipil. Hal ini sesuai dengan kesimpulan ahli sosial Belanda, Geertz Hofstede, yang pernah menganalisa dimensi budaya Rusia. Dari analisis itu, disimpulkan bahwa Rusia memiliki indeks “*power distance*” (jarak kekuasaan) yang relatif tinggi. Negara Barat pada umumnya memiliki indeks “*power distance*” yang rendah, di mana elemen demokrasi menjadi sendi utama kenegaraan. Rakyat di negara dengan indeks “*power distance*” yang tinggi seperti di Rusia, relatif bisa menerima otoritas yang kurang demokratis. Terbukti dengan sikap kooperatif rakyat Rusia terhadap segala kebijakan Putin⁵². Pada masa pemerintahan Putin dilakukan perubahan orientasi politik luar negeri.

Elemen utama dari pemerintahan Putin adalah “*order*”, yakni ketertiban hukum dan penegakan aturan main. Hal ini tampaknya mewarnai program dan kebijakan Putin pada tahun-tahun sepanjang 2000-2008. Putin menjalankan beberapa program dalam pemerintahannya. Program pertama, yang berlangsung dua tahun pertama, adalah memulihkan kekacauan pada kehidupan sosial dan menegakkan disiplin bagi aparat pemerintah. Itu penting agar aparat tak terjebak pada praktek-praktek kotor seperti korupsi, manipulasi dan favoritisme. Program kedua yang berlangsung selama delapan hingga sepuluh tahun berikutnya adalah pengenalan pembangunan ekonomi yang liberal secara moderat dan disesuaikan dengan iklim dan kondisi ekonomi Rusia. Program ini akan memperkuat lembaga dan aturan main hukum yang berkaitan dengan kepemilikan swasta. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin ketenangan dan menghindari perampokan kekayaan negara oleh kaum oligarki.

⁵² Simon Saragih, op.cit, hal. 108.

Secara umum, dasar politik Putin dijuluki sebagai “demokrasi berdaulat”. Ini diterima warga Rusia, di mana demokrasi Rusia harus ditentukan oleh Rusia itu sendiri, bukan pihak luar. Rusia, kata Putin, tidak siap dengan liberalisme klasik, dan tidak bisa segera, atau tidak akan pernah bisa seperti AS dan Inggris. Ia juga mengeritik para pemimpin Soviet yang gagal membangkitkan negara, dan juga tokoh reformasi Rusia yang telah membuat sejumlah kesalahan yang sebenarnya bisa dihindarkan. Akan tetapi, Putin juga sama seperti Yeltsin, selalu berusaha untuk menjaga hubungan dekat dengan para reformis. Inilah salah satu kelihaihan Putin dalam berdiplomasi. Putin masih menjalin hubungan erat dengan para teknokrat yang telah menjatuhkan ekonomi Rusia asalkan mereka masih mau diajak bekerja sama bahu-membahu membangkitkan kembali ekonomi Rusia.

Soal reformasi di era 1990-an, Putin mengatakan tidak puas dengan kemajuan yang dicapai, walau secara umum reformasi masih bergerak maju. Tujuan terbaru Putin adalah mengangkat Rusia dari kubangan lumpur yang dalam. Beberapa orang masih menuduhnya sebagai birokrat tanpa rasa. Namun, mantan Menlu AS Madeleine Albright pernah mengatakan: “Saya melihat dua sisi sikap presiden Rusia ini, yakni tegas dan terkesan tak demokratis tetapi juga ingin mengikuti jalur reformasi. Dengan dunia internasional, Putin sebenarnya mencoba menjelaskan posisinya dan misi pemerintahannya. Ia tak diam dan pernah berbicara di sebuah resepsi di Moskow, yang dihadiri para dubes asing untuk Rusia.”⁵³

Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di negara-negara Asia Tengah setelah runtuhnya Uni Soviet. Kegagalan penerapan kebijakan dalam bidang energy pada masa kepemimpinan Boris Yeltsin membuat Vladimir Putin membuat berbagai macam perubahan. Tujuan utama dari

⁵³ Ibid, hal.109

perubahan kebijakannya tidak lain adalah untuk perkembangan ekonomi Rusia agar menjadi lebih baik.

Pada masa kepemimpinan Vladimir Putin, prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia adalah terus menjaga negara-negara bekas jajahan Soviet yang disebut sebagai *'The near abroad'* karena menganggap wilayah tersebut memiliki kedekatan sejarah, budaya dan ekonomi selama berabad-abad. Reformasi ekonomi Putin bertujuan menjadikan Rusia sebagai magnet ekonomi bagi negara-negara bekas jajahan Uni Soviet tersebut dengan mendirikan CIS (*Commonwealth Independent States*).

Kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara anggota PNM/ (CIS) berdasarkan saling keterbukaan dan kesepakatan di kedua belah pihak dalam berbagai bidang. Putin mempertegas pengaruhnya di wilayah near abroad tersebut dengan menjadikan ketergantungan ekonomi bagi wilayah tersebut terhadap Rusia sebagai sumber kekuatan baru dalam bidang ekonomi.

Dalam bidang perdagangan, minyak dan gas benar-benar menjadi prioritas selama masa kepresidenan Vladimir Putin. Sebagian besar kemajuan ekonomi Rusia ditunjang dari sektor energi Rusia yang memunculkan Rusia sebagai produsen gas alam terbesar di dunia, dengan output sebesar 607.4 milyar meter kubik (bcm) pada tahun 2007, dan sebagai nomor dua produsen minyak setelah Arab Saudi, dengan produksi minyak 9.98 juta barel per hari⁵⁴.

Terdapat perbedaan mencolok antara penggunaan sumber daya energy pada masa kepemimpinan Putin dengan Boris Yeltsin. Boris Yeltsin menggunakan sumberdaya energy sebagai komoditas dagang dan dimana pula kebijakan tersebut

⁵⁴ Jeffrey Mankoff, *Eurasian Energy Security*, Council Special Report No. 43 February 2009, hlm.7. (Jurnal)

justru membawa perekonomian Rusia memburuk. Swastanisasi perusahaan energy menimbulkan kerugian bagi Rusia.

Vladimir Putin melihat hal tersebut sebagai suatu dasar dalam penerapan kebijakan energy di masa kepemimpinannya. Putin menyetujui bahwa dalam skema strategi energi negara, Rusia menempatkan kebijakan energi sebagai pusat diplomasi⁵⁵. Putin menegaskan bahwa industri sumber alam digunakan untuk menaikkan kekuatan *geo-political* Rusia.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam empat hal: pertama, Kremlin ingin mencegah negara-negara Eropa dalam melakukan diversifikasi persediaan sumber-sumber energi, khususnya dalam gas. Kedua, Kremlin ingin memperkuat penguasaan pasar gas internasional. Ketiga, Kremlin ingin mendapatkan “asset hilir”, kemampuan distribusi dan penyimpanan di negara – negara Barat. Keempat, Kremlin ingin menggunakan aset-asetnya untuk tekanan politik.

Prioritas Rusia terhadap cadangan minyak dan gas alamnya yang berlimpah, maka negara ini menerapkan kebijakan ‘pengamanan energinya’ dengan cara-cara yang ketat, antara lain; Pertama, tetap menjaga suplai energi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menasionalisasi beberapa perusahaan energi milik swasta yang sekarang menjadi perusahaan milik negara. Selain itu, pencarian sumber-sumber energi yang diyakini mengandung kandungan minyak dan gas, ekspansi ke luar negeri, dan melakukan kerjasama energi dengan pihak-pihak asing. Kedua, memastikan jalur pengirimannya (energi) dengan aman, hal ini dapat dilakukan melalui memonopoli dan mengontrol jalur-jalur pipa dengan ketat⁵⁶.

⁵⁵ Edward Lucas, “Russia’s New Cold War”, diakses dari www.wsj.com/articles/edward-lucas-russias-new-cold-war-1392840839 pada 12 Maret 2019

⁵⁶ *ibid*

Putin telah membawa Rusia melakukan banyak terobosan yang membebaskannya dari kehancuran domestik, khususnya dari krisis ekonomi yang diwariskan oleh para pendahulunya. Ia telah mengembalikan Rusia ke jalur pembangunan revolusioner yang terorganisir rapi. Di mana ia tidak menginginkan pihak asing campur tangan di dalam proses itu karena Rusia mampu bangkit sendiri.

Karakter jalan pemikiran Putin yang pelan tapi pasti telah berhasil membuat Rusia menata diri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Politik luar negeri Rusia di bawah Putin semakin menemukan bentuknya, tidak sekedar menyenangkan Barat seperti pada masa awal Rusia pasca-Soviet di permulaan 1990an ketika Yeltsin mulai berkuasa. Tapi Rusia bisa menentukan sendiri misi dan visi politik luar negerinya yang bebas dari keterlibatan pihak luar. Berakhir sudah perdebatan berkepanjangan tentang motivasi politik luar negeri Rusia. Banyak slogan politik yang didengungkan dan diperjuangkan oleh para nasionalis Rusia sebelum Putin berkuasa⁵⁷. Seperti slogan “bekerja sama dengan bekas musuh”, “membangun sebuah busur demokrasi di belahan bumi sebelah utara”, dan “membasuh kaki di lautan selatan”. Namun yang tersisa hanya satu keinginan bagi Putin yaitu membangun kembali kejayaan Rusia.

Tanpa komunisme, Rusia tak ubahnya sebuah negara normal, tidak terbelenggu oleh mesianisme ideologi. Tanpa beban imperial, Rusia bisa melonggarkan diri dari kewajiban untuk secara militer melindungi, misalnya, Georgia di sebelah Barat dan Kazakhstan di sebelah Tenggara Rusia. Geografi Rusia yang membentang dari Eropa di sebelah Barat hingga pantai pasifik di sebelah Timur agaknya tidak dilihat sebagai beban geostrategis tetapi sebagai peluang geopolitik untuk

⁵⁷ Diantaranya adalah Menlu Andreii Kozyrev, Sergei Makov, Menteri Perdagangan Alexei Kudrin dan Vladimir Zhirinovskiy.

mencapai tujuan nasional Rusia. “Persemakmuran Negara-negara Merdeka” (*Commonwealth of Independence States, CIS*) dapat menjadi gawang diplomatik di belahan Barat, sedangkan “Organisasi Kerjasama Shanghai” (*Shanghai Cooperation Organization, SCO*) menjadi pilar penyangga di sebelah Timur⁵⁸.

Semua itu tentu tidak muncul dalam sekejap. Dasar-dasar perubahan yang diletakkan sebelumnya oleh Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin memberi kontribusi yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kultur strategis yang mengakar pada kebesaran Peter Agung tentu merupakan faktor penting yang mengakar hampir di setiap pemimpin Rusia masa kini. Vladimir Putin memberi warna tersendiri, baik karena pandangannya yang lebih kosmopolitan dibanding para pendahulunya, maupun karena keberhasilannya melakukan konsolidasi elit, dan menggenggam kembali daerah-daerah pinggiran Rusia. Dalam waktu sekitar dua tahun di tampuk singgasana. Presiden Putin berhasil membenahi apa yang oleh Nodari Simonia dikenal sebagai “anarkhi menyeluruh” (*total anarchy*)⁵⁹.

Faksionalisasi di kalangan elit kebijakan luar negeri, sebuah tradisi yang amat kuat pada masa kepemimpinan Yeltsin, tampaknya juga semakin surut. Ditopang oleh kaum liberal yang sering disebut sebagai kelompok Petersburg dan rekan-rekannya semasa berdinasi di lingkungan intelijen⁶⁰, Putin sepenuhnya memegang kendali. Sofistikasinya untuk

⁵⁸ Anggoro, Kusnanto, *Kebijakan Politik Keamanan Rusia di Asia Pasifik*, hal. 62

⁵⁹ Pavel Felgenhauer, “*Putin in Stalin’s Footsteps*”, *Moscow Times*, diakses dari <http://freerepublic.com/focus/f-news/955819/posts> pada 2 April 2019

⁶⁰ Marissa Payne, “*Behind the Enigma: Changing Internal Factors and Putin’s Foreign Policy*”, Master Thesis, Boston University 2006

berada di tengah mereka membuat Putin mempunyai ruang gerak leluasa untuk mewujudkan gagasan-gagasannya. Lebih dari itu, dukungannya pada “perang terhadap terorisme”, yang dikemas dengan bahasa yang lebih arif dibandingkan ungkapan yang kerap digunakan Presiden Bush, melunakkan Barat tanpa harus menyakiti negara-negara Islam.

Selain itu, kemampuannya untuk mengendalikan berbagai pergolakan di kawasan pinggirannya meyakinkan Barat bahwa Rusia bukan negara lemah; dan pada saat yang sama kaum nasionalis di dalam negeri Rusia meyakini bahwa kebangkitan Rusia berada di pelupuk mata. Sebab itu, di dalam maupun di luar negeri, Presiden Putin berhasil membangun citranya sebagai seorang pemimpin yang dapat dipercaya, dan kepada siapa mereka harus berbicara. Satu konsensus baru yang semakin kuat adalah bahwa kepentingan ekonomi harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lain, seperti politik dan keamanan. Seperti Napoleon III, Putin meyakini bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan hubungan antar-negara menjadi lebih karib dan menyumbang keamanan nasional. Sebagaimana Deng Xiaoping, Putin menganggap bahwa liberalisasi ekonomi itu dapat dilakukan tanpa harus melakukan demokratisasi politik secara liberal.

Pada bab ini dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan kebijakan dalam setiap kepemimpinan. Sebagai contoh pada masa Boris Yeltsin energy diperlakukan sebagai sebuah komoditas pasar, namun sangat berbeda saat Putin menggunakan energy sebagai sebuah komoditas strategis.

Kebijakan yang diterapkan di masa kepemimpinan Vladimir Putin merujuk pada nasionalisasi sumberdaya energy . Penguasaan Negara atas sumber daya energy menjadi tujuan utama pemerintahan Putin. Kemudian sumberdaya energy juga menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Rusia.